

Hambatan Komunikasi Politik Antar Partai di Parlemen

Agus Tohamba, Ulfah Attamimi

Harian Rakyat Sultra, email: agustohamba@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Kendari, email: ulfah.fisipumk@gmail.com

Correspondence author: agustohamba@gmail.com

Received: 10/03/2022. Revised: 24/03/2022. Published: 22/06/2022

Abstract

This study examines the communication barriers that occur in the Setgab, led by the Democratic Party with its coalition partners in Parliament, regarding the Government's Policy which proposes an increase in fuel prices in the 2012 Revised State Budget Bill. This study is based on the theorization of social construction theory, symbolic interaction theory, and dramaturgical theory. Researchers choose the constructivist paradigm as a perspective in seeing the object of research, and use a qualitative approach to obtain in-depth findings, through case study methods to find specifics. Primary data was obtained through in-depth interviews with key informants and direct observation by observing the course of every meeting to discuss government proposals at Commission VII DPR, Banggar DPR and DPR Plenary Sessions. The data were analyzed qualitatively using domain and taxonomy analysis. The results of the study indicate that there are communication barriers that cause: communication that does not reach the bottom, weak control and commitment in the Setgab, differences in interests, mass media and public opinion, becoming a stage for performances, and freedom of opinion that hinders communication. Meanwhile, why Setgab does not run ideally is because the position of Setgab is not legally binding on coalition partners in Parliament. The conclusion clearly shows that there is a communication situation that does not work effectively because of communication barriers. Therefore, there needs to be a political breakthrough that legally binds every political party when pledging a coalition in Parliament, in order to improve effective political communication in the next period.

Keywords: Communication Barriers; Political Communication; Organizational Communication; Parliament

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hambatan komunikasi yang terjadi di Setgab pimpinan Partai Demokrat dengan mitra koalisinya di Parlemen, atas Kebijakan Pemerintah yang mengusulkan kenaikan Harga BBM dalam Rancangan UU APBN Perubahan Tahun 2012. Studi ini berlandaskan teorisasi dari teori kontruksi sosial, teori interaksi simbolik, dan teori dramaturgis. Peneliti memilih paradigma konstruktivis sebagai perspektif dalam melihat obyek penelitian, serta memakai pendekatan kualitatif agar mendapatkan temuan yang mendalam, melalui metode studi kasus guna menemukan kekhususan. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci dan observasi langsung dengan mengamati jalannya setiap rapat pembahasan usulan pemerintah di Komisi VII DPR, Banggar DPR dan Sidang Paripurna DPR. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis domain dan taksonomi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan komunikasi yang sebabkan: komunikasi yang tidak sampai kebawah, lemahnya kontrol dan komitmen di Setgab, adanya perbedaan kepentingan, media massa dan opini publik, menjadi panggung pertunjukkan, dan kebebasan berpendapat yang menghambat komunikasi. Sedangkan Mengapa Setgab tidak berjalan ideal dikarenakan posisi Setgab yang tidak mengikat secara hukum terhadap mitra koalisi di Parlemen. Kesimpulan tersebut menunjukan secara jelas adanya situasi komunikasi yang tidak berjalan efektif karena adanya hambatan komunikasi. Karena itu, perlu ada terobosan politik yang mengikat secara hukum setiap parpol ketika berikrar berkoalisi di Parlemen, guna meningkatkan komunikasi politik yang efektif di periode berikutnya.

Kata kunci: Hambatan Komunikasi; Komunikasi Politik; Komunikasi Organisasi; Parlemen

Pendahuluan

Terbentuknya koalisi partai politik (Parpol) pada 7 Mei 2010, dinamai Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri dari sejumlah parpol hasil Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun 2009. Lembaga ini dimotori oleh Partai Demokrat selaku parpol pemenang, sekaligus pendukung Pemerintahan SBY-Budiono di Parlemen, telah mewarnai dinamika politik di DPR RI selama periode 2009-2014.

Awal pendirian setgab dilatari oleh semangat bagaimana mengefektifkan pelaksanaan pemerintahan di kabinet, ketika berhadapan dengan Parlemen yang di dalamnya diisi oleh sembilan parpol hasil Pemilu 2009 lalu termasuk Partai Demokrat sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif. Parpol-parpol ini membawa kepentingan masing-masing, jika tak mampu dirangkul, maka kepentingan pemerintah akan mudah diganggu di DPR.

Dibentuknya Setgab bersama sejumlah parpol di Parlemen, menunjukkan adanya upaya positif membangun sebuah komunikasi politik yang efektif sejumlah parpol di DPR, khususnya Partai Demokrat dalam merangkul seluruh kepentingan parpol di Parlemen. Selain Setgab, DPR sendiri selaku pembuat Undang-Undang, terus mencari format ideal dalam rangka mengefektifkan pemerintahan terpilih di Parlemen, salah satunya adalah

bagaimana menghadirkan koalisi yang permanen, sehingga tak mudah diganggu oleh parpol di DPR yang berbeda kepentingan dengan pemerintahan terpilih, melalui revisi paket Undang-Undang Politik.

Terbentuknya koalisi memerlukan sebuah komunikasi timbal balik yang terarah antara mitra koalisi demi menjamin kelancaran penyampaian pesan-pesan politik yang dikomunikasikan di DPR. Termasuk komunikasi kepada anggota parpol diluar mitra koalisi. Karena selama ini, pembahasan kebijakan publik di parlemen, selalu diwarnai dinamika politik yang cukup alot, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik dalam memperjuangkan kepentingan partai politik.

Dalam komunikasi politik, pesan-pesan disampaikan atau dipertukarkan antar komunikator terhadap komunikan melalui berbagai saluran politik. Komunikasi politik merupakan setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber-sumber kepada sejumlah penerima pesan (Arrianie, 2010). Dalam pertukaran pesan-pesan politik, ada dinamika yang berkembang sepanjang penyampaian pesan tersebut berlangsung, ada yang menunjukkan sikap kekompakkannya, namun disisi lain adapula yang menunjukan sikap antagonisnya. Apalagi jika hal itu sudah menyangkut tentang kepentingan parpol terhadap suatu kebijakan yang akan diputuskan bersama. Biasanya pertentangan parpol tidak hanya kepada rekannya sesama mitra koalisi yang mendukung pemerintah misalnya, namun juga dengan parpol oposisi diluar pendukung pemerintah. Sebagaimana politik, komunikasi juga sukar dimengerti dan dihayati dengan baik, sehingga sering mengundang perdebatan (Arifin, 2011).

Oleh karenanya, pemerintahan presidensial plus koalisi yang dinamai Setgab diharapkan dapat mendorong kabinet menjalankan program-program yang semuanya diarahkan pada tercapainya pemerataan pembangunan (Urbaningrum, 2010). Lahirnya koalisi politik tersebut tak bisa dipisahkan dari adanya komunikasi politik yang dilakukan para elit politik dalam mempersatukan niat dan tujuan yang hendak dicapai bersama. Namun seiring berjalannya dinamika politik di DPR, mitra koalisi di Setgab ternyata tidak sepenuhnya menjalankan cita-cita awal pembentukan koalisi yakni menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mengawal pemerintahan SBY-Budiono hingga selesai pada 2014. Pertentangan dan perbedaan pendapat yang melahirkan kegaduhan politik justru datang dari mitra koalisi. Padahal koalisi diikat dengan kontrak politik yang diteken bersama agar mitra koalisi tak bermuka dua dalam menyikapi setiap keputusan yang diputuskan bersama. Hadirnya Setgab bersama kontra koalisi ternyata tak cukup ampuh mendorong mitra koalisi kompak satu suara di Parlemen.

Lemahnya komunikasi Partai Demokrat terhadap mitra koalisi dapat dilihat dari kurang kompaknya sikap mitra koalisi dalam memberikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di DPR. Hal ini jelas menunjukkan adanya problematika politik bagi Partai Demokrat sebagai partai pemerintah di DPR. Dalam konteks komunikasi politik, lemahnya ikatan koalisi akan menjadi pemicu (*trigger*) lemahnya kohesi politik, sehingga menjadi penghambat tercapainya tujuan serta bisa membentuk situasi komunikasi yang kurang menguntungkan bagi Partai Demokrat dalam setiap

pengambilan keputusan, seperti kurang mendapat dukungan kuat, tak tercapainya keseimbangan posisi antara sesama mitra koalisi dalam Setgab.

Sementara itu, pemerintahan SBY juga tak bisa melepaskan diri dari ikatan koalisi, mengingat Partai Demokrat bukan satu-satunya partai politik yang mendominasi suara mayoritas di parlemen. Hal ini cukup rawan bagi Partai Demokrat jika terus memaksakan setiap kebijakan pemerintah agar mendapat dukungan dari anggota DPR. Partai Demokrat akhirnya menyusun langkah mengatasi kegaduhan di internal koalisi agar konsisten mengawal kebijakan pemerintah di parlemen dengan menyodorkan kontrak koalisi baru yang ditandatangani masing-masing partai koalisi. Kontrak koalisi ini pada intinya berisi tentang kesiapan partai politik yang tergabung dalam koalisi, untuk bersama-sama mengawal pemerintahan SBY – Budiono hingga 2014.

Namun kontrak koalisi baru yang disodorkan itu ternyata tak mampu membawa perubahan yang kuat di tubuh koalisi. Partai-partai koalisi di parlemen tetap dengan sikapnya masing-masing yakni mementingkan kepentingannya sendiri. Hal itu dikarenakan koalisi yang terbangun bukan karena koalisi ideologis, namun lebih bersifat pragmatis. Meski Partai Demokrat terus menebar ‘ancaman’ kepada mitra koalisi yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah bisa kehilangan jatah Menteri-nya di kabinet. Sekalipun belum ada satupun mitra koalisi yang didepak dari Setgab.

Penelitian ini fokus mengkaji hambatan komunikasi politik yang terjadi di Setgab dalam mengawal kebijakan pemerintah di parlemen, khususnya terhadap usulan kenaikan harga BBM dalam APBN Perubahan tahun 2012. Permasalahan yang ditelaah meliputi apa saja yang menghambat komunikasi politik para mitra koalisi (Setgab) dalam mengawal kebijakan pemerintah di Parlemen dan faktor penyebab tak berjalan idealnya komunikasi tersebut di Parlemen.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dapat dijelaskan sebagai sebuah format penelitian deskriptif kualitatif yang memusatkan diri pada sesuatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Pada ciri lainnya, deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial (Bungin, 2010). Studi kasus juga dapat diartikan sebagai kajian analitis dan deskriptif secara mendalam dan rinci tentang suatu program yang diselenggarakan oleh perorangan, organisasi, lembaga atau masyarakat dalam konteks lingkungan tertentu (Sudjana, 2008). Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang hendak mendalami kasus tertentu secara mendalam (eksploratif) (Creswell, 2010).

Studi kasus eksploratif dipilih untuk mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus, tidak hanya menggambarkan suatu gejala, fakta atau realitas. Selain itu, dilakukan pula studi kasus observasional yang menekankan pada satu tempat tertentu dalam organisasi semisal rapat-rapat pembahasan di ruang komisi, di ruang fraksi, ruang sidang paripurna dan sebagainya termasuk di Setgab, dan menekankan pada kelompok

spesifik dari kelompok besar yang ada serta pada beberapa aktifitas tertentu dalam organisasi tersebut.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snow ball, teknik pengumpulan datanya triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008).

Jenis data dalam penelitian ini yakni primer dan data sekunder. Data primer berkaitan dengan hambatan komunikasi dalam Setgab atas mitra koalisinya dalam pembahasan usulan pemerintah menaikkan harga BBM dalam RUU APBN Perubahan 2012. Juga data mengenai faktor yang menghambat komunikasi sehingga Setgab dan mitra koalisinya tak berjalan ideal di parlemen. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dan digunakan peneliti berasal dari literatur, dokumen-dokumen rapat, risalah rapat pembahasan anggaran, penelitian terdahulu, foto-foto, dan bahan-bahan rapat dari pemerintah, berita di media massa, yang relevan dengan masalah penelitian. Data sekunder digunakan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi, mendefenisikan dan memahami, serta mengembangkan masalah yang diteliti. Memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional, sehingga memungkinkan peneliti mendapat pengertian yang lebih baik (Habibi, 2012).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan atau *observasi* langsung ke objek penelitian, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis melalui tahapan sebelum memasuki lokasi, selama di lokasi, dan pasca tahapan lokasi. Bungin (2010), membagi beberapa jenis analisis data pada penelitian kualitatif, diantaranya yang relevan digunakan peneliti terkait penelitian komunikasi politik ini, yaitu: Pertama, analisis dominan (mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh mengenai seluruh dari obyek penelitian. Kedua, analisis taksonomi yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi terperinci.

Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran obyek penelitian secara umum atau yang ada ditingkat permukaan secara utuh mengenai okyek penelitian. Melalui analisis ini peneliti melakukan pemeriksaan catatan lapangan guna menentukan bagian-bagian atau unsur-unsur yang menjadi hambatan komunikasi politik Setgab terhadap mitra koalisinya di Parlemen terkait usulan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dalam APBN 2012.

Tabel 1.

Analisis Domain

Analisis Domain
• Hambatan Komunikasi Setgab dengan Mitra Koalisi di Parlemen. • Setgab Tak Berjalan Ideal di DPR.

Sumber: hasil olah data peneliti

Adapun analisis tasksonomi digunakan untuk menjabarkan domain-domain secara lebih rinci dan menyeluruh, guna mengetahui struktur internalnya, dengan tujuan agar penelitian dapat lebih fokus dalam proses pengamatan. Teknik ini terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilah domain tersebut menjadi subdomain, serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Pasca observasi, selanjutnya peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut guna menemukan hubungan dari tiap-tiap domain tersebut.

Tabel 2.
Analisis Taksonomi

Domain	Analisis Taksonomi (Jabaran Rinci dari Domain)
Hambatan Komunikasi Setgab dengan Mitra Koalisi	• Hambatan Fisik: (kondisi, waktu dan tempat), bahasa verbal dan non verbal (berupa perdebatan, aksi diri, walk out), pengalaman dan kompetisi. • Hambatan Perilaku: kepentingan sesaat, drama sandiwara politik (pertunjukan), ketidakpastian (lemahnya pengaruh, lemahnya komitmen), emosi, pengaruh luar (media massa).
Komunikasi Tak Berjalan Baik	Penyebab Komunikasi politik Tidak berjalan Ideal di DPR.

Sumber: hasil olah data peneliti

Hasil Penelitian dan Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti ditemukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah di Parlemen, melalui RUU RAPBN Perubahan Tahun 2012, terlihat perbedaan sikap dan pendapat partai politik dari koalisi mitra pemerintah mengenai kebijakan kenaikan harga BBM, bahkan pendapat yang berbeda itu menjadi sebuah keputusan final parpol dalam menyikapi kebijakan itu dalam sidang paripurna DPR RI.

Lemahnya kontrol muncul dari sikap parpol mitra koalisi yang tidak melarang anggotanya di DPR untuk berbicara ke publik, baik pada forum-forum diskusi publik, rapat resmi DPR, seperti rapat dengar Pendapat (RDP), rapat komisi, rapat konsultasi dan lainnya. Meskipun mereka telah terikat kontrak politik untuk tetap setia mengawal setiap kebijakan pemerintah di DPR. Hal tersebut membuat sikap mitra koalisi tak sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibahas dan dirumuskan bersama di Setgab.

Selaku pimpinan koalisi, Partai Demokrat ternyata tidak memiliki kemampuan dalam mengawal mitra koalisinya agar mengikuti sikap mereka dalam mendukung usulan yang ditawarkan pemerintah. Sehingga menjadi kesempatan besar bagi anggota DPR sesama mitra koalisi untuk terus mempolemikkan kebijakan tersebut. Hal ini nampak dalam rapat-rapat resmi di Komisi VII bersama pemerintah, sesama anggota Setgab justru yang paling tajam perdebatannya mempersoalkan kenaikan BBM. Rapat pembahasan kenaikan harga BBM menjadi forum debat dan saling mementahkan argumen antar anggota Komisi VII DPR. Perdebatan itu bahkan sampai melebar keluar dari ruang Komisi VII. Pembiaran perdebatan merupakan bentuk lemahnya kontrol dari partai koalisi untuk menertibkan anggotanya. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Informan Ketua DPP Partai Demokrat UA, sebagai berikut :

“Dalam pertemuan-pertemuan di Setgab semua sudah dibahas, tapi sosialisasi ditingkat bawah kadang kala masih ada problem, masih tidak jalan. Apa yang diputuskan di tingkat Setgab, di bawah itu tidak jalan, tidak lancar, karena komunikasinya yang tidak tegas kepada anggotanya dan hal seperti ini yang sering kita alami. Ada kontrol yang lemah dari partai politik kepada anggotanya saat berbicara mengenai usulan kebijakan yang dibahas di DPR,”.

Selaku pimpinan partai koalisi, Partai Demokrat juga melakukan upaya dengan memanggil para elit partai mitra koalisi untuk menenangkan situasi yang terus meruncing. Namun hal itu tak membuahkan hasil, tetap saja parpol mitra koalisi tak mampu mengontrol anggotanya yang terus-terus menentang kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini dikarenakan banyak kebijakan-kebijakan yang belum terkomunikasikan dengan baik kepada anggota parlemen. Sehingga tak jarang parpol kembali mengklarifikasi pernyataan anggotanya dengan menyampaikan bahwa pernyataan yang dilontarkan anggotanya itu bukan keputusan resmi fraksi, atau tak mewakili fraksi melainkan hanya pendapat pribadi dari anggota DPR. Sehingga kata perlu adanya komunikasi yang intens di antara anggota Setgab. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan informan, Ketua Harian Setgab SH, berikut ini :

“Mengenai kontrak politik yang dilanggar merupakan hal yang lumrah, kita sudah buat perjanjian, tapi masih dilanggar. Jadi bukan di Setgab aja, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, kita sudah buat komitmen kontrak tapi ada saja yang tidak patuh, jadi itu adalah hal yang biasa terjadi. Padahal sebenarnya kalau sudah dibuatkan kontrak, maka itu harus dipatuhi, tapi ada juga yang tidak patuh, ya itu sering banyak terjadi. Karena ada yang tidak patuh dengan kontrak, makanya saling tuntutan menuntut. Tapi di partai politik itu tidak bisa terjadi, karena jika dia tidak menaati kontrak, siapa yang menuntut dia,”.

Realitas diatas menggambarkan betapa lemahnya kontrol dari masing-masing pihak, khususnya Partai Demokrat selaku pimpinan Setgab terhadap mitra koalisinya di Parlemen. Hal ini sekaligus menampakkan lemahnya komitmen dari mitra koalisi untuk mematuhi kontrak koalisi yang sudah ditandatanganinya sejak menyatakan diri untuk bergabung. Meski telah ada upaya dari Setgab untuk meredam situasi tersebut dengan mengingatkan kembali kontrak politik yang sudah ditandatangani bersama serta ancaman mendepak mitra koalisi dari Setgab. Keadaan ini merupakan salah satu

penghambat komunikasi politik antara Setgab dan mitra koalisi dalam membahas RUU APBN Perubahan tahun 2012.

Temuan berikutnya adalah adanya perbedaan kepentingan masing-masing partai atas kebijakan pemerintah tersebut. Kepentingan yang berbeda-beda menjadi faktor utama mengapa perbedaan pendapat sesama anggota partai koalisi terjadi. Kepentingan yang berbeda disertai pendapat-pendapat yang berbeda hingga melahirkan pernyataan-pernyataan yang keras dari mitra koalisi menjadi faktor pemicu komunikasi politik tidak efektif berjalan.

Keberatan partai politik mitra koalisi atas kebijakan menaikkan harga BBM dalam RUU APBN 2012, seperti PKS dan Partai Golkar diawal usulan kebijakan dimasukkan ke DPR, didasarkan karena beberapa hal. *Pertama*: kenaikan harga BBM saat ini tidak perlu dilakukan karena masih banyak alternatif-alternatif yang bisa ambil pemerintah untuk menutupi defisit APBN karena subsidi, seperti menaikkan pajak barang impor yang masuk ke Indonesia, menaikkan pajak produksi batu bara 20 persen kepada setiap pengusaha batu bara. *Kedua*: kebijakan mengurangi subsidi harga BBM bertentangan dengan UUD 1945, karena konstitusi tidak membenarkan sektor energi dilepas atau tunduk pada mekanisme pasar. *Ketiga*: energi merupakan hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah wajib menjamin ketersediaan energi sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. *Keempat*: mayoritas kondisi ekonomi masyarakat dibawah garis kemiskinan sehingga pemberlakuan kebijakan tersebut akan semakin menyengsarakan rakyat. *Kelima*: harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dipastikan naik jika kebijakan tersebut diberlakukan. *Keenam*: infrastruktur pembangunan seperti jalan, fasilitas umum belum memadai.

Selain itu, Partai Golkar secara resmi mengeluarkan instruksi kepada kader-kadernya yang duduk di parlemen untuk menaati empat point dari sikap politik Partai Golkar menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM, melalui Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada hari Kamis 29 Maret 2012 membacakan empat point sikap partai Golkar. *Pertama*, Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. *Kedua*, karena menaikkan atau tidak menaikkan menjadi domain pemerintah, posisi Golkar melalui Fraksi Partai Golkar tetap mengawasi dan mengkritisi bilamana ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. *Ketiga*, Partai Golkar tetap mempertahankan subsidi energi diberikan dan terakhir sikap politik Partai Golkar ini instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR agar dapat dilaksanakan (<http://www.tempo.co/read/news/2012/03/29/078393458/4-Poin-Sikap-Golkar-Tolak-Kenaikan-BBM>)

Selain itu, ada pula kepentingan jangka panjang dan jangka pendek bagi masing-masing parpol atas kebijakan kenaikan harga BBM dalam RAPBN 2012, yaitu menunjukan sikap yang sesuai dengan kehendak publik, dengan menolak kebijakan itu karena dianggap tidak populis. Ini dilakukan agar partai politik mendapat dukungan suara masyarakat, karena telah bersikap sesuai dengan kehendak rakyat. Sebagaimana dijelaskan informan UA, berikut ini:

“Sebenarnya mereka (mitra koalisi) tahu betul kenaikan harga BBM adalah kebutuhan mendesak, negara lain saja harga BBM-nya tinggi apalagi kita. Tapi karena faktor besarnya pengaruh media dan besarnya penolakan dari masyarakat yang dikemas media, akhirnya mereka balik badan. Ini kembali pada kepentingan partai itu semua, baik yang jangka panjang dan jangka pendek. Kalau interaksi kami dengan teman-teman mitra koalisi, ideologinya sama, yang paling berpengaruh itu adalah kepentingan partai itu sendiri yang jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, di Setgab sudah setuju, ternyata diluar mereka lain lagi bicaranya. Yang pasti mereka partai koalisi belum ada terang-terangan mundur dari Menteri, karena pertimbangan kepentingan jangka panjang, mereka masih melihat dengan proram-program di kementerian yang mereka diduduki bisa dimanfaatkan untuk kepentingan partai untuk mendapat dukungan suara, jadi ini masih kental sekali”.

Dengan faktor-faktor diatas partai semakin jelas menunjukkan ada perbedaan kepentingan masing-masing partai dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM dalam RAPBN 2012. Terutama mengenai kepentingan jangka panjang partai politik. Perbedaan ini menimbulkan pertentangan kepentingan, sehingga menghambat komunikasi dalam upaya mencari jalan keluar dari kebijakan yang diambil pemerintah dari parpol mitra koalisi.

Temuan berikutnya adalah kebijakan menaikkan harga BBM dalam RAPBN Perubahan 2012 menjadi panggung pertunjukan anggota DPR. Melalui momentum ini anggota DPR memiliki panggung strategis untuk mengaktualisasikan dirinya, mengenalkan dirinya serta menunjukkan sikapnya yang pro rakyat atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak populis. Sebagai wakil rakyat, mereka harus menampakkan dirinya berada di garis terdepan menolak keras kebijakan ini. Ini sejalan dengan perspektif teori dramaturgis oleh Erving Goffman yang mengemukakan bahwa untuk menjelaskan tindakan manusia maka bisa memakai analogi drama dan teater (Poloma, 2004). Dalam konteks interaksi anggota partai politik di DPR, teori dramaturgis ini cukup memudahkan dalam memotret aktifitas para politisi di parlemen. Dengan melihat bahwa DPR merupakan panggung pertunjukan bagi kader-kader partai yang duduk menjadi anggota legislatif DPR RI (politisi) mengaktualisasikan peran-peran mereka sebagai wakil rakyat.

Rapat-rapat komisi, rapat Banggar, sidang paripurna maupun diskusi publik yang terbuka untuk umum dan disiarkan langsung oleh media-media nasional menjadi ruang pertunjukan bagi anggota DPR untuk menunjukkan simpati mereka terhadap rakyat yang mayoritas menolak kebijakan tersebut. Panggung depan menjadi tempat anggota DPR menyampaikan pesan-pesan politiknya dari kebijakan pemerintah itu, agar masyarakat tahu bahwa mereka telah berjuang atas nama rakyat.

Panggung politik di DPR diwarnai dengan begitu banyak trik maupun intrik demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berbagai trik-trik dalam menarik perhatian publik sengaja dilakukan anggota DPR, seperti aksi walk out dari ruang sidang saat pembahasan kenaikan harga BBM dalam RAPBN 2012, intrupsi dengan memukul meja, berteriak-teriak di forum sidang paripurna, hingga mendatangi meja pimpinan untuk menyampaikan aspirasinya. Anggota DPR sangat paham betul panggung politik harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyita perhatian publik.

Hal tersebut dikemukakan informan UA, berikut ini:

“Apa yang mereka lakukan itu dengan berbagai aksi di dalam rapat-rapat resmi, hanya mencari panggung. Yang penting tampil beda, berputar-putar dulu, kita anggap ini biasa, wajar, karena dipolitik ini penuh dengan trik-trik dan interik. Jika aa kebijakan yang sudah jadi opini yang tidak populis, mereka akan memainkan panggung politik. Karena suara partai tergantung dari dinamika dimasyarakat, mereka takut dianggap selalu mengekor. Sehingga kami kadang kala lebih hormati sikap partai oposisi, yang sudah jelas sikapnya dari awal. Justru yang menjadi dilema kita, kalau yang koalisi, justru sikap mitra sendiri yang bertentangan dengan kita,”.

Strategi-strategi yang dipertonton itu, bertujuan untuk mengagalkan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan proses komunikasi politik antara mitra koalisi menjadi terhambat, karena mereka semakin sulit untuk menyamakan persepsi. Semakin Partai Demokrat memaksakan kehendaknya, semakin keras parpol mitra koalisi melakukan penentangan. Sementara di waktu yang sama partai mitra koalisi terus melakukan pembiaran anggotanya untuk terus menantang kebijakan tersebut.

Hambatan berikutnya yang peneliti temukan adalah pengaruh media massa dan opini publik yang cukup besar, sehingga memperuncing pembahasan kebijakan pemerintah tersebut di Parlemen. Saat itu, setiap hari masyarakat disuguhkan dengan pemberitaan perkembangan seputar kenaikan harga BBM yang rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Bulan April 2012.

Pemberitaan yang massif dan berulang-ulang oleh media massa cetak dan elektronik serta media online selama kurun waktu sejak kebijakan usul kenaikan harga BBM ini mulai diwacanakan pemerintah, hingga masuk dalam agenda resmi pembahasan di DPR melalui komisi terkait sampai pada pengambilan keputusan tingkat II di sidang paripurna DPR, memiliki pengaruh besar atas sikap partai politik yang ada di parlemen.

Banyak partai politik saat awal kebijakan dimasukkan ke DPR memilih mengikuti suara masyarakat umum yang menolak rencana pemerintah tersebut. Media-media massa menyiarkan berbagai aksi unjuk rasa, demonstrasi khususnya dari para mahasiswa, buruh serta organisasi-organisasi masyarakat (ormas) di berbagai daerah yang menentang keras kebijaksanaan itu. Bahkan media tidak hanya menyajikan berita seputar pembahasan kebijakan itu di parlemen, tetapi dampak dari rencana kenaikan harga BBM tak luput diberitakan, seperti harga-harga kebutuhan pokok yang mulai naik akibat dari rencana kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di sejumlah SPBU, serta penangkapan oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di balik rencana pemerintah tersebut dengan cara menimbun BBM, atau membeli BBM bersubsidi kemudian menjualnya industri atau ke Negara tetangga.

Komentar-komentar mitra koalisi menanggapi setiap aspirasi yang masuk ke Parlemen semuanya menolak usulan pemerintah itu, kecuali Partai Demokrat yang konsisten sejak pertama mengawal kebijakan ini. Massifnya pemberitaan soal penolakan kenaikan harga BBM tidak hanya menjadi berita utama media-media massa nasional, namun media-media di daerah juga tetap menempatkan soal kenaikan harga BBM menjadi

berita utama di daerahnya. Kondisi ini sangat memengaruhi sikap partai politik mitra koalisi dalam menyikapi kenaikan harga BBM, jika tidak mengikuti kehendak publik, parpol tersebut bisa dikatakan tidak pro rakyat. Yang berarti partai politik akan kehilangan suara karena dinilai tak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Kehilangan dukungan rakyat merupakan sesuatu yang sangat ditakutkan partai politik, karena suara rakyatlah yang membuat partai politik bisa tetap berada di parlemen, sebagai tempat yang dijamin konstitusi dalam merumuskan persoalan bangsa.

Massifnya pemberitaan saat itu soal kebijakan menaikkan harga BBM dalam Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012, mengalahkan sejumlah isu hangat seperti isu Bank Century dan beberapa kasus korupsi sejumlah anggota DPR yang tengah ditangani KPK diwaktu yang bersamaan. Bahkan, beberapa media massa nasional, menghadirkan elit-elit partai politik untuk mengikuti debat langsung di layar kaca dan disiarkan secara langsung.

Besarnya opini masyarakat menantang kebijakan pemerintah membuat mitra koalisi berbalik badan menentang kebijakan tersebut. Atau memilih bermain dua kaki, satu kaki berada di Setgab, satu kaki bergabung bersama partai oposisi yang sejak awal konsisten menolak kenaikan harga BBM. Bahkan ada komentar-komentar miring parpol tidak berkaki dua tapi berkaki seribu.

Terkait hal tersebut di atas informan UA yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR, mengemukakan:

“Jadi apapun isu-isu itu, saya liat bergantung pada opini media. Kedua, banyak teman-teman di koalisi yang terpancing opini media, faktor dominasi pemberitaan media yang mengubah sikap mereka. Kadang kala sudah diputuskan di Setgab, seperti rapat tentang BBM, begitu isunya tidak populer, tidak populis dan media mengangkatnya akhirnya mereka berbalik badan, padahal awalnya tidak seperti itu,”.

Maka sangat jelas media dan opini publik cukup menjadi faktor dominan yang membuat sikap partai koalisi menjadi berubah-ubah, sehingga menimbulkan komunikasi yang tidak jelas di antara sesama mitra koalisi yang tergabung dalam Setgab atas usulan pemerintah menaikkan harga BBM. Kondisi ini jelas merugikan partai demokrat selaku partai yang memimpin Setgab mengawal setiap kebijakan pemerintah di Parlemen. Ketidakmampuan Partai Demokrat menyatukan sikap partai koalisi menunjukkan lemahnya komunikasi politik partai demokrat terhadap mitra koalisi yang terbangung di Setgab. Seharusnya Partai Demokrat mampu memastikan setiap kebijakan pemerintah mendapat dukungan dari mitra koalisi.

Hambatan komunikasi lainnya adalah adanya hak konstitusional setiap anggota untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Dengan hak ini, anggota DPR secara leluasa dan bebas untuk berbicara karena mendapat jaminan oleh Undang-Undang. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di depan umum yang dilindungi UU menjadi instrument para politisi di parlemen dalam menunjukkan kepiawaiannya menyampaikan pesan-pesan politik.

Bebasnya anggota DPR berbicara di forum-forum resmi di DPR dalam pembahasan Rancangan UU APBN perubahan tahun 2012 menimbulkan kesulitan Setgab mengontrol mitra koalisinya agar bisa satu suara mencapai kesepakatan pembahasan Rancangan UU RAPBN Perubahan 2012.

Saat pembahasan dimulai di Komisi VII DPR, setiap anggota Komisi VII DPR masing-masing fraksi tak ada yang memilih diam, semuanya menggunakan hak konstitusional untuk berbicara di setiap sesi bertanya. Tidak hanya bertanya, anggota DPR justru lebih banyak menyampaikan pendapatnya ketimbang bertanya kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Sementara argumentasi yang dikemukakan anggota Komisi VII DPR juga dimentahkan oleh sesama anggota DPR lainnya meski sesama mitra koalisi. Sebagaimana diungkapkan informan UA, di bawah ini :

“Perdebatannya sangat tajam, karena setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk berpendapat. Dengan hak ini, dinamikanya sudah bergejolak sejak pembahasan di komisi, kadang Setgab akhirnya turun tangan untuk meredam situasi yang sudah sangat tajam di tingkat bawah.

Dengan hak konstitusional itu, anggota DPR dibiarkan terus mewarnai dinamika dan menjadi panggung, walaupun *ending*-nya nanti tetap akan rangkul atau sepakat. Tapi sudah muncul dinamika di media, walaupun nanti akan diklarifikasi bahwa itu pendapat pribadi. Mitra koalisi main dua kaki, ada orang yang sengaja didorong berbicara lain, meski pada akhirnya keputusannya lain dari apa yang sudah dibicarakan anggotanya,”.

Akibatnya debat kusir tak bisa dihindari, sehingga beberapa kali pimpinan komisi harus menskor sidang karena suasana rapat komisi sudah gaduh. Hal yang sama juga terjadi dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR. Perdebatan panjang antara partai politik atas kebijakan ini, membuat rapat ditutup tanpa berhasil mencapai kesepakatan bersama. Tata tertib DPR yang menjadi pedoman anggota DPR tak bisa mengontrol ketat para anggota DPR untuk lebih santun dalam menyampaikan pendapatnya, dengan alasan UU tentang hak berpendapat lebih tinggi dibandingkan dengan tata tertib DPR.

Sementara itu, fraksi selaku perpanjangan tangan parpol di parlemen justru memberikan dukungan penuh anggotanya untuk terus bersuara lantang atas kebijakan ini, anggota fraksi tak boleh kalah dengan argumentasi dari fraksi lainnya. Saling dukung antara sesama anggota fraksi menghadapi pendapat dan pernyataan fraksi lainnya terlihat dalam setiap pembahasan. Fraksi biasanya memasang anggota DPR tertentu untuk berbicara di publik menghadapi fraksi lainnya, langkah ini merupakan kebijakan partai, dimana partai politik memiliki kebijakan tersendiri dalam menghadapi berbagai situasi yang sedang berlangsung, seperti dalam pembahasan kebijakan kenaikan harga BBM. Sebagaimana yang diungkap informan SH, berikut ini:

“Parpol punya kebijakan sendiri-sendiri sesuai dengan kebijakan mereka masing-masing. Setgab hanya bagaimana menjembatani supaya kepentingan itu bisa masuk dalam koridor. Bahwa itu tidak solid, kita juga tidak menghendaki

bisa solid 100 persen, karena memang filosofi dasarnya hanya untuk menyamakan persepsi,”.

Hak menyatakan pendapat tanpa adanya kontrol yang ketat dari fraksi, membuat komunikasi antara mitra koalisi semakin terhambat. Partai Demokrat begitu sulit mengatur mitra koalisi yang ada di Setgab agar lebih santun dalam menyampaikan pendapatnya terkait kenaikan harga BBM. Berbagai langkah yang dilakukan partai demokrat untuk membujuk mitra koalisi agar bisa mengatur anggotanya, meski setiap anggota diberi kebebasan untuk berbicara. Namun setidaknya fraksi selaku perpanjangan tangan Parpol seharusnya bisa lebih ketat mengatur anggotanya Ketika menyampaikan pendapat di depan public.

Simpulan

berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa hambatan komunikasi yang terjadi antara lain disebabkan oleh *Pertama*, lemahnya kontrol setgab dan komitmen mitra koalisi. *Kedua*, adanya perbedaan kepentingan masing-masing partai politik. *Ketiga*, sebagai panggung pertunjukan. *Keempat*, pengaruh media massa dan opini publik. *Kelima* kebebasan berpendapat yang menghambat komunikasi.

1. Lemahnya kontrol yang dimaksud adalah kurangnya pengaruh yang kuat dari Partai Demokrat kepada partai-partai politik yang menjadi mitra koalisinya di Parlemen, untuk menekan mitra koalisinya agar bersikap sesuai arah kebijakan yang ditempuh pemerintah. Akibatnya, Setgab kesulitan mencari jalan keluar dalam mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda dari pandangan mitra koalisi mengenai kebijakan pemerintah tersebut.
2. Perbedaan kepentingan adalah adanya sikap yang beberapa masing-masing mitra koalisi terkait usulan itu, ada yang menolak usulan kebijakan kenaikan harga BBM dalam APBN Perubahan 2012, sementara beberapa partai lainnya, terutama Partai Demokrat mendukung penuh usulan kenaikan harga BBM tersebut.
3. Panggung pertunjukan adalah sebuah drama atau sandiwar politik yang dipertontonkan mitra koalisi menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM, drama politik tersebut diwarnai dengan banyaknya penampilan (*performance*) dan aksi-aksi individu para politisi yang dipertontonkan dihadapan publik.
4. Pengaruh media massa sangat penting terhadap pembentukan opini publik, sehingga berdampak pada keputusan-keputusan yang akan diambil. Pengambilan keputusan selalu melihat perkembangan dinamika dari opini publik yang berkembang, dengan kata lain penyebaran informasi dari media massa, akan sangat mempengaruhi keputusan politik pengambil kebijakan, seperti kebijakan menaikkan harga BBM dalam APBN Perubahan 2012. Sebab keputusan politik ini cenderung mengikuti perkembangan opini masyarakat.

5. Bebasnya pendapat yang disuarakan anggota DPR RI tanpa ada batasan dan halangan dari pihak manapun, terhadap kebijakan kenaikan harga BBM dalam APBN Perubahan 2012, telah menciptakan pro dan kontra yang luas, akibatnya. Akibat kebebasan berpendapat yang tidak terkontrol itu telah menimbulkan ketidakpastian komunikasi tentang kelompok mana yang paling benar pendapatnya terkait kebijakan tersebut.

Penyebab Setgab tak berjalan ideal di parlemen dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah disebabkan, karena Setgab yang dipelopori pembentukannya oleh Partai Demokrat bukan merupakan koalisi yang sesungguhnya atau bukan koalisi benaran. Setgab tidak bisa mengintervensi keputusan-keputusan partai politik. Sebab dalam konstitusi negara kita, tidak dikenal ada konsep koalisi atau oposisi. Begitupun juga dalam sistem pemerintahan presidensial yang juga tidak mengenal adanya koalisi, karena posisi presiden dalam sistem ini sangat kuat.

Karena tidak diatur dalam konstitusi, maka tidak ada kewajiban bagi partai politik yang tergabung dalam Setgab, untuk mengikuti secara mutlak dan baku mengenai apa yang sudah menjadi keputusan di Setgab. Sebab tidak ada aturan yang mengikat secara hukum yang bisa partai politik di Setgab bisa dituntut secara hukum karena tidak mengikuti keputusan Setgab. Seperti dalam kasus kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah dalam RUU APBN Perubahan Tahun 2012, Setgab tak bisa mempengaruhi keputusan partai politik mitra koalisinya untuk bersama-sama menyetujui rencana pemerintah tersebut

Referensi

- Arifin, Anwar. (2011). *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan- Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Jogjakarta: Edisi ke II. PT. Graha Ilmu.
- Arrianie, Lely, (2010). *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan Dipangung Politik*. Bandung: Penerbit Widya Padjajaran.
- Burhan Bungin, (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Penerbit PT. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan Mixed*. Jakarta. Penerjemah. Achmad Fawaid. Yogyakarta; Penerbit Pustaka Pelajar.
- Poloma, Margaret M. (2004). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Sudjana, Djudju. (2008). *Evaluasi Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya,
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.



Urbaningrum, Anas. (2010). *Revolusi Sunyi Mengapa Partai Demokrat dan SBY Menang Pemilu 2009*. Jakarta: Penerbit PT Mizam Publika.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif .

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3.

Undang-Undang No. 04 Tahun 2012 Tentang APBN Perubahan 2012.

Buku Pedoman Sosialisasi MPR RI.